

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan pers juga berperan dalam mewujudkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945.¹

Pers yang merdeka dalam mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19. Pasal itu berbunyi: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media

¹ UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konsiderans huruf a.

apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.²

Di dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan mengenai fungsi pers yaitu sebagai media pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Di samping itu, pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.³ Fungsi pers sebagai kontrol sosial sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.⁴ Kontrol sosial dimaksudkan agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi lebih baik.

Lahirnya UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers merupakan tonggak sejarah di mana pers kembali mendapatkan kemerdekaannya setelah dibelenggu selama pemerintahan Orde Baru.⁵ Dalam UU Pers yang baru tersebut, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak bisa dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran (pasal 4).⁶

Sebenarnya, isi UU Pers Orde Baru yaitu UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

² *Ibid*, Penjelasan

³ *Ibid*, Pasal 3.

⁴ *Ibid*, Penjelasan.

⁵ David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 34-35

⁶ UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4

Pers hampir sama dengan UU pers 1999 bahwa pers nasional tidak dapat disensor (pasal 4) dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara (pasal 5) akan tetapi “masa peralihan” (pasal 20) yang tak jelas ujungnya menjegal kebebasan pers tersebut.⁷ Masa peralihan inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk membuat peraturan lain yang membelenggu kebebasan pers.

Pada “masa peralihan” tersebut, penerbitan surat kabar harus mengantongi Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Apabila salah satu atau kedua lembaga pemberi izin tersebut mencabut izinnya, secara otomatis penerbitan surat kabar itu dibredel.⁸ Departemen Penerangan menjadi satu-satunya lembaga pemberi izin penerbitan pers sejak 3 Mei 1977, karena Kopkamtib meniadakan SIC dengan alasan semakin mantapnya stabilitas keamanan nasional dan secara fungsional, pers nasional dibina oleh Departemen Penerangan.⁹

⁷ David T. Hill, *Op. Cit.*, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 34-35

⁸ *Ibid*, hlm. 35.

⁹ P. Swantoro dan Atmakusumah, *Pembredelan Pers dalam Sejarah Indonesia*, dalam Abdurrachman Surjomihardjo (Ed.), *Beberapa Segi*

Beberapa pembredelan pada masa Orde Baru yang patut dicatat di sini adalah pembredelan tahun 1974 dan 1994. Tahun 1974, tepatnya beberapa minggu setelah peristiwa “Malapetaka 15 Januari” (Malari), 12 penerbitan kehilangan SIT dan SIC. Mereka yaitu: *Nusantara*, *Harian KAMI*, *Indonesia Raya*, *Abadi*, *The Jakarta Times*, *Mingguan Senang*, *Pemuda Indonesia*, *Majalah Berita Mingguan Ekspres*, *Pedoman* (semuanya di Jakarta), *Suluh Berita* (Surabaya), *Mahasiswa Indonesia* (Bandung), dan *Indonesia Pos* (Ujung Pandang).¹⁰

Secara umum, penyebab pembredelan 12 terbitan di atas karena mengkritik kebijakan pemerintah. Pers yang di awal orde baru terlihat mesra dengan pemerintah ternyata menyimpan ketegangan tersembunyi. Ketegangan itu memuncak ketika peristiwa Malari di mana lautan demonstrasi terjadi karena kedatangan Menteri Jepang Tanaka. Waktu itu, Pers memberitakan demonstrasi tersebut dan berbagai kekerasan yang menimpa demonstran.¹¹

Tragedi pembredelan Januari 1974 terulang lagi 20 tahun kemudian, tepatnya pada 21 Juni 1994. Waktu itu,

Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 185-186

¹⁰ David T. Hill, *Op. Cit.*, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 37-38.

¹¹ *Ibid*, hlm. 37.

Menteri Penerangan Harmoko mencabut izin terbit tiga mingguan berita ternama di negara ini, yaitu majalah *Tempo*, Tabloid *DeTIK*, dan majalah *Editor*. Pembredelan tersebut dikarenakan mereka berani menayangkan tulisan tentang bisnis keluarga presiden, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, cacat administrasi pada anggaran pemerintahan, dan pecahnya kelompok-kelompok sempalan dalam tubuh pemerintah maupun tentara.¹²

Selain pembredelan, pemerintah Orde Baru juga menahan redaksi penerbitan yang dibredel tersebut. Misalnya adalah penahanan redaksi surat kabar *Indonesia Raya* Enggak Bahau'ddin (selama hampir 11 bulan) dan Mochtar Lubis (sepanjang dua setengah bulan) setelah meletusnya Malari.¹³ Pers yang lolos dari sapu bredel di era Orde Baru adalah pers yang membelenggu diri sendiri yaitu yang menjalin pengertian dan kerja sama dengan pemerintah.¹⁴

Pembredelan pers bukan hanya terjadi saat Orde Baru. Sejak masa penjajahan kolonial sampai masa Orde Lama pun pers sering menjadi sasaran amarah penguasa

¹² *Ibid*, hlm. 43.

¹³ *Ibid*, hlm. 37.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57-58.

sehingga pembredelan pers merupakan hal yang sudah biasa terjadi.¹⁵ Di masa Orde Lama, pembredelan pers secara besar-besaran dimulai sejak pemberlakuan SOB (*Staat ban Oorlog en Beleg*) atau negara dalam keadaan perang pada 14 Maret 1957.¹⁶ 39 pers dibredel pada tahun 1957, 40 pada 1958, 42 pada 1959, 44 pada 1960, 15 pada 1961, dua pada 1962, satu pada 1963, enam pada 1964, dan enam pada 1965. Alasan pembredelan pers oleh pemerintah Orde Lama itu meliputi pemuatan berita tidak benar, penghinaan kepada pemerintah, sumber berita tidak resmi, pemuatan berita tanpa izin, dan cenderung mengganggu keamanan dan ketertiban. Pembredelan tersebut disertai pula dengan penahanan tokoh-tokoh penting pers yang dibredel.¹⁷

Contohnya adalah pemimpin redaksi *Indonesia Raya*, Mochtar Lubis ditahan dan dikenakan tahanan rumah¹⁸ dan pemimpin redaksi harian *Keng Po* Injo Beng Goat yang juga dikenakan tahanan rumah.¹⁹ Ada juga wartawan yang dituntut di pengadilan dengan tuduhan

¹⁵ P. Swantoro dan Atmakusumah, *Op. Cit.*, Pembredelan Pers dalam Sejarah Indonesia, hlm. 170.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 200.

¹⁷ Edward C. Smith, *Pembredelan Pers di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 169, 181, 208, 210, 212, 214, 216, 218, dan 220

¹⁸ *Ibid*, hlm. 156.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 160.

pencemaran nama baik, namun dibebaskan oleh hakim. Dia adalah mantan redaktur pelaksana *Indonesia Raya* Kustiniyati Mochtar.²⁰

Lebih jauh lagi, pemerintah Orde Lama juga ingin Pers tunduk pada kebijakan pemerintah. Oleh karena itu pada tahun 1958, pemerintah mengharuskan penerbitan pers mempunyai izin terbit. Izin terbit itu disempurnakan pada tahun 1960 di mana pers harus sanggup menjalankan 19 pasal yang inti isinya mewajibkan pers mendukung dan membela pemerintah.²¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejak kemerdekaan Indonesia, kebebasan pers selalu mendapat halangan dari pemerintah. Alasan pengekangan kebebasan pers yang paling sering digunakan adalah demi menjaga ketertiban umum. bernegara.²²

Jika melihat UU pers terbaru (UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers), maka peran politik negara sudah tidak tampak. Politisasi pers berganti menjadi demokratisasi pers. Di tengah kebebasan dan liberalisasi tersebut, “lawan” pers yang dapat memberangus perannya bukan lagi kekuasaan negara atau pemerintahan, tetapi bisa jadi kepentingan lain

²⁰ *Ibid*, hlm. 166

²¹ P. Swantoro dan Atmakusumah, *Op. Cit.*, *Pembredelan Pers dalam Sejarah Indonesia*, hlm. 181-183

²² *Ibid*, hlm. 189.

misalnya ekonomi secara luas maupun kepentingan politik pemiliknya sendiri.²³

Di Indonesia sekarang ini telah terdapat perusahaan besar di bidang media massa. Perusahaan tersebut menguasai berbagai macam industri media dan menggabungkannya menjadi konglomerasi. Konglomerat media terbukti dapat mengontrol isi media dan memberikan pengaruh dalam perpolitikan di Indonesia. Selain itu, media dikelola sebagai bisnis yang hanya mewakili kepentingan pemilik dan kekuasaan yang diwakilinya. Hal ini tentunya membahayakan hak warga untuk mendapatkan informasi yang benar.²⁴

Konglomerasi media juga melemahkan fungsi kontrol media terutama yang menyangkut kepentingan pemilik media. Media Indonesia dan Metro TV enggan memberitakan keterlibatan Surya Paloh dalam kredit macet Bank Mandiri. ANTV dan TVONE tidak memberitakan lumpur Lapindo yang melibatkan perusahaan Bakrie yang sekaligus pemilik kedua televisi itu.²⁵

²³ Salvatore Simarmata, *Media dan Politik: Sikap Pers terhadap Pemerintah Koalisi di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), hlm. 122.

²⁴ Dedi Fahrudin, "Konglomerasi Media: Studi Ekonomi Politik terhadap Media Group", dalam *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. XII, No. 01, Mei, 2013, hlm. 81

²⁵ *Ibid*, hlm. 83

Kerajaan pers bermula pada masa Orde Baru tepatnya pada periode 1980-an. Belajar dari breidel pada tahun 1974, perusahaan pers menggunakan cara pandang baru dengan lebih mengutamakan bisnis. Perusahaan pers mengumpulkan modal dan melakukan ekspansi ke media-media lain. Contohnya adalah dengan menyuntikkan modal ke pers daerah atau dengan kerja sama redaksi. Ekspansi ini membentuk kerajaan pers yaitu jaringan pers yang terpusat di pers nasional di Jakarta dengan pers daerah sebagai cabang-cabangnya. Kerajaan pers juga mempunyai banyak terbitan bersegmen khusus yaitu bacaan anak-anak, kaum muda, wanita, gaya hidup, olahraga, komputer, dan lain-lain. Beberapa kerajaan pers juga mencoba merambah bisnis lain di luar media.²⁶

Semua pemaparan di atas ingin menunjukkan bahwa masalah-masalah yang menghambat kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsinya di masa sekarang sudah pernah dirasakan oleh wartawan-wartawan di masa lalu. Kondisi pers di Indonesia saat ini juga hasil dari kejadian di masa lalu. Maka dari itu, penulis ingin belajar dari wartawan masa lalu yang mempunyai prinsip kuat dalam memperjuangkan kemerdekaan pers. Wartawan yang berani

²⁶ David T. Hill, *Op. Cit.*, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 94-116.

berkata benar walau itu mengkritik penguasa. Pemilik surat kabar yang surat kabarnya pernah dibredel pada masa Orde Lama dan Orde Baru dan pemilik tersebut sudah merasakan jeruji besi saat Orde Lama dan Baru. Wartawan sekaligus pemilik surat kabar itu adalah Mochtar Lubis (1922-2004).²⁷

Mochtar Lubis memimpin surat kabarnya yaitu *Indonesia Raya* yang terbit pada periode Orde Lama dan Orde Baru yaitu tahun 1949-1958 dan 1968-1974. Pada masa pertama atau saat Orde Lama, ia sering melakukan kritik terhadap lembaga dan orang pemerintah yang berkuasa. Akibatnya, ia ditahan pada 21 Desember 1956 dan selanjutnya dikenakan tahanan rumah sampai 29 April 1961. Setelah bebas, ia langsung mengikuti konferensi *International Press Institute* (IPI) di Tel Aviv dan berpidato pada momen tersebut. Pidato tersebut membuatnya ditahan lagi pada 14 Juli 1961 sampai 17 Mei 1966.²⁸

Beberapa liputan *Indonesia Raya* yang membuat pemerintah Orde Lama marah adalah dukungan kepada reorganisasi tentara, perkawinan Sukarno dengan Hartini, panitia ramah-tamah Konferensi Asia-Afrika yang

²⁷ David T Hill, *Jurnalisme dan Politik di Indonesia Biografi kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 4

²⁸ *Ibid*, hlm. 45-46.

menyediakan wanita penghibur bagi delegasi negara yang datang, tuduhan korupsi kepada menteri luar negeri Roeslan Abdulgani, dan dukungannya kepada perwira pemberontak Zulkifli Lubis. Peliputan terakhir inilah yang membuat Mochtar ditahan dengan tuduhan berkomplot bersama pemberontak untuk merongrong kewenangan pemerintah pusat.²⁹

Kritik-kritik kepada pemerintah juga ditulis dalam tajuk *Indonesia Raya* yang ditulis oleh Mochtar sendiri. Contohnya adalah tajuk *Indonesia Raya*, 16 Oktober 1952 yang mengkritik sistem partai liberal di mana parlemen selalu berusaha membubarkan kabinet. Mochtar menilai sikap parlemen tersebut tidak bertanggung jawab dan ingin menentukan masa depan bangsa sendiri tanpa menghargai unsur lain yaitu kabinet pemerintahan dan militer.³⁰

Mochtar Lubis adalah salah satu pengkritik konglomerasi dalam pers. Ia mengatakan bahwa pemilik pers akan menggunakan terbitannya untuk mendukung kepentingan sendiri. Apalagi jika pemilik pers itu adalah pejabat pemerintah, hal ini menurut Lubis tidak benar. Memang mulai tahun 1980-an, pejabat pemerintah

²⁹ *Ibid*, hlm. 52-66.

³⁰ *Ibid*, hlm. 54-55.

contohnya Harmoko dan keluarga presiden menanamkan modal di perusahaan pers.³¹

Melihat semua sepak terjang Mochtar Lubis di atas, sangatlah pantas jika ia diberi label wartawan berprinsip. Ia tidak pernah tergiur oleh iming-iming kekuasaan atau harta. Untuk mempengaruhi Mochtar Lubis, harus dengan berbicara tentang prinsip. Tindak-tanduknya dalam kehidupan selalu dikendalikan oleh prinsip yang diyakininya. Hanya dengan mengubah prinsipnya maka bisa diubah juga perilakunya.³²

Indonesia adalah negara berketuhanan yang mengakui keberadaan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu tercermin dalam Pancasila sila pertama dan pembukaan UUD 1945. Posisi Tuhan dalam negara mendapat tempat yang tertinggi karena dalam pembukaan UUD 1945, kemerdekaan yang bisa diraih oleh bangsa Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan. Bagi Negara Indonesia, agama menjiwai dalam proses berbangsa dan bernegara.³³

³¹ David T Hill, *Op. Cit.*, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 124-125

³² Arief Budiman. Mochtar Lubis Manusia Multidimensioal dan Kontroversial dalam Atmakusumah (Ed.), *Mochtar Lubis Wartawan Jihad*, (Jakarta: Harian KOMPAS, 1992), hlm. 127

³³ Ahmad Gaus A.F, *Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 361

Agama sebagai jalan hidup yang dianut oleh masyarakat Indonesia juga perlu merumuskan aturan tentang Pers. Sebagai satu di antara agama yang dianut masyarakat Indonesia, Islam wajib memiliki konsepsi tentang pers. Kewajiban itu sudah dilaksanakan, terbukti dengan adanya ilmu Komunikasi Islam yang sudah banyak ditulis oleh para akademisi baik itu dalam bentuk buku maupun jurnal. Penulis tersebut di antaranya Abdul Muis dengan buku yang berjudul *Komunikasi Islami*, Asep Saeful Muhtadi dengan buku *Komunikasi Dakwah* dan lain sebagainya. Selain itu, Komunikasi Islam juga dijadikan program studi di berbagai universitas Islam di Indonesia.

Menurut penulis, Mochtar Lubis sebagai representasi dari wartawan negarawan juga perlu dinilai dari perspektif Islam. Jika ternyata prinsip kewartawanan Mochtar Lubis sesuai dengan etika Komunikasi Islam, maka ia dapat dijadikan contoh bagi umat Islam yang akan berjihad di jalan Pers.

Buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad* merupakan buku yang menceritakan kehidupan Mochtar Lubis sebagai wartawan, seniman, dan budayawan yang disunting oleh mantan redaktur pelaksana koran Indonesia Raya, Atmakusumah. Dalam buku tersebut terdapat tulisan Atmakusumah tentang sejarah Mochtar Lubis sebagai

pemimpin umum dan pemimpin redaksi Indonesia Raya. Selain itu, ada pendapat para tokoh tentang Mochtar Lubis dan pandangan Mochtar Lubis tentang Pers di Indonesia. Menurut penulis, buku ini sangat layak dijadikan sumber data utama untuk mengetahui prinsip-prinsip kewartawanan Mochtar Lubis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip kewartawanan Mochtar Lubis yang terdapat dalam buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad* editor Atmakusumah?
2. Bagaimana prinsip kewartawanan Mochtar Lubis dalam buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad* ditinjau dari sudut pandang etika komunikasi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui prinsip kewartawanan Mochtar Lubis dalam buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad*
- b) Untuk mengetahui bagaimana prinsip kewartawanan Mochtar Lubis dalam buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad* jika ditinjau dari sudut pandang etika komunikasi Islam.

2. Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

a) Bagi peneliti

- 1) Peneliti dapat belajar mengenai sosok Mochtar Lubis sebagai wartawan yang juga sebagai pemimpin umum dan pemimpin redaksi koran yang ia punya sendiri
- 2) Peneliti dapat belajar bagaimana menganalisis isi sebuah buku dengan mengumpulkan pembahasan perihal tertentu dalam buku ke dalam satu bagian utuh sehingga perihal tertentu tersebut mudah dipahami
- 3) Peneliti dapat memahami ilmu Komunikasi Islam beserta segala sesuatu yang terdapat di dalamnya yaitu; filsafat keilmuan komunikasi Islam (ontologi, epistemologi, dan aksiologi), etika komunikasi Islam, etika komunikasi Islam, dan lain-lain
- 4) Setelah memahami komunikasi Islam, peneliti dapat menilai apakah komunikasi yang dilakukan seseorang/institusi sesuai dengan komunikasi Islam atau tidak.

b) Bagi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

- 1) Penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka tentang Komunikasi Islam
- 2) Penelitian ini dapat menjadi satu contoh penelitian yang melihat prinsip komunikasi seseorang dengan etika komunikasi massa Islam.

c) Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan bacaan bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana seharusnya wartawan muslim berjihad di jalan pers.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis dan sistematis atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang secara tematis ada kesesuaian atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi, mencari aspek-aspek yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, mengembangkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, dan menjelaskan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian tentang Mochtar Lubis dan penelitian lain yang akan dicantumkan di tinjauan pustaka ini adalah:

1. Skripsi Badik Farida dengan judul “*Amar Ma’ruf Nahi Munkar* dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers”.³⁴ Dengan menggunakan analisis isi, skripsi tersebut ingin menjawab bagaimana kode etik jurnalistik Dewan Pers dilihat dalam konteks *amar ma’ruf nahi munkar* dan apa saja substansi *amar ma’ruf nahi munkar* dalam kode etik jurnalistik Dewan Pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kode etik jurnalistik Dewan Pers sejalan dengan prinsip-prinsip Islami. Walaupun tidak menggunakan nama dan simbol Islam, tetapi substansinya mengandung *amar ma’ruf nahi munkar*. Kode etik tersebut dapat dijadikan pedoman bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya karena isinya sesuai dengan ajaran Islam.

Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut adalah penelitian penulis menggunakan konsep Komunikasi Islam untuk meninjau prinsip kewartawanan Mochtar Lubis sedangkan skripsi tersebut

³⁴ Badik Farida, “*Amar Ma’ruf Nahi Munkar* dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Semarang: IAIN Walisongo, 2014.

menggunakan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* untuk meninjau kode etik jurnalistik Dewan Pers. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas jurnalistik atau kewartawanan dan sama-sama menggunakan analisis isi untuk menjawab masalah penelitian.

2. Skripsi Yesi Ristiana dengan judul “Program *Infotainment* ditinjau dari Etika Komunikasi Islam”.³⁵ Skripsi tersebut ingin menjawab bagaimana pemberitaan dalam *infotainment* Insert siang di TRANS TV edisi Ramadhan 1437 H jika ditinjau dari etika komunikasi Islam. Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis isi. Skripsi tersebut mengambil kerangka teori etika komunikasi Islam menurut Jalaluddin Rakhmat yang mengungkapkan enam bentuk gaya bahasa (*qawlan*) dalam Alquran yaitu *qawlan sadidan*, *qawlan baligha*, *qawlan karima*, *qawlan ma'rufan*, *qawlan layyina*, dan *qawlan maisura*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pemberitaan dalam program *infotainment* Insert siang bermuatan baik, misalnya pemberitaan konflik

³⁵ Yesi Ristiana, “Program *Infotainment* ditinjau dari Etika Komunikasi Islam”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Semarang: UIN Walisongo, 2016.

rumah tangga, kehidupan asmara, kawin-cerai, dan lain-lain. Pemberitaan yang sesuai dengan etika komunikasi Islam menurut Jalaluddin Rakhmat sebesar 82 persen dengan rincian *qawlan sadidan* 14 persen, *qawlan baligha* 18 persen, *qawlan karima* 11 persen, *qawlan ma'rufan* 18 persen, *qawlan layyina* 7 persen, *qawlan maisura* 14 persen.

Skripsi ini dengan penelitian penulis mempunyai kesamaan yaitu sama-sama melihat objek menggunakan sudut pandang etika komunikasi Islam. Perbedaannya, skripsi melihat tayangan *infotainment* dan menggunakan etika komunikasi Islam versi Jalaluddin Rakhmat sedangkan penelitian penulis melihat prinsip kewartawanan Mochtar Lubis dan menggunakan etika komunikasi massa Islam versi Mafri Amir.

3. Skripsi Suardi Lapamusu dengan judul “Moralitas dalam Novel *Senja di Jakarta* Karya Mochtar Lubis”.³⁶ Skripsi ini ingin menjawab pelajaran moral seperti apa yang terdapat dalam novel *Senja di Jakarta*. Moral dalam skripsi ini dibagi dalam tiga bentuk prinsip dasar yaitu

³⁶ Suardi Lapamusu, “Moralitas dalam Novel *Senja di Jakarta* Karya Mochtar Lubis”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013.

prinsip sikap baik, prinsip keadilan, dan prinsip hormat terhadap diri sendiri.

Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan/melukiskan hasil penelitian secara faktual dan akurat. Dalam skripsi ini, moral yang terdapat dalam novel *Senja di Jakarta* akan dideskripsikan dari sudut pandang tiga prinsip dasar moral, yaitu prinsip sikap baik, prinsip keadilan, dan prinsip hormat terhadap diri sendiri.

Skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa ditinjau dari prinsip sikap baik, novel *Senja di Jakarta* menggambarkan perilaku baik masyarakat, yaitu sopan santun, kejujuran, menghormati, bersyukur, mendoakan orang lain, kesadaran, rela berkorban, tolong-menolong, dan ikhlas. Ditinjau dari prinsip keadilan, novel *Senja di Jakarta* menggambarkan perilaku keadilan baik terhadap diri sendiri maupun sesama manusia. Keadilan terhadap diri sendiri digambarkan dengan menyediakan kebutuhan pokok, keadilan sesama manusia digambarkan dengan berbagi kesenangan, berbelas kasihan, perlakuan yang sama, merasakan penderitaan orang lain, memperhatikan kehidupan rakyatnya, dan memberikan hak orang lain.

Ditinjau dari prinsip hormat terhadap diri sendiri, novel *Senja di Jakarta* menggambarkan sikap pengendalian diri agar tidak bersikap buruk yaitu minum minuman beralkohol, berputus asa, membiarkan diri terlantar, dan memperlak orang lain. Sikap hormat terhadap diri sendiri digambarkan dengan mempunyai pegangan hidup dan menyesali dirinya yang diperlak.

Skripsi tersebut dengan penulis sama-sama meneliti tentang Mochtar Lubis. Perbedaananya, skripsi tersebut meneliti novel karya Mochtar Lubis dan ingin mengidentifikasi moralitas di dalamnya, sedangkan penelitian penulis meneliti buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad* dan ingin mengidentifikasi prinsip kewartawanan Mochtar Lubis.

4. Skripsi Hardiyani Windari dengan judul “Analisis Latar dalam Novel *Jalan Tak Ada Ujung* Karya Mochtar Lubis serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA)”.³⁷ Skripsi tersebut ingin menggambarkan latar novel *Jalan Tak Ada Ujung* karya Mochtar Lubis dan implikasi

³⁷ Hardiyani Windari, “Analisis Latar dalam Novel *Jalan Tak Ada Ujung* Karya Mochtar Lubis serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA)”, (Skripsi tidak dipublikasikan) Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

novel tersebut terhadap pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia di SMA.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati. Metode ini digunakan dengan tujuan menggambarkan hubungan antar unsur-unsur cerita dan sejarah Indonesia yang terkandung di dalamnya. Dengan begini, pembaca mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sejarah Indonesia yang terkandung dalam latar novel *Jalan Tak Ada Ujung* karya Mochtar Lubis. Dengan pendekatan sosiologi sastra, cerita novel *Jalan Tak Ada Ujung* dihubungkan dengan keadaan sosial yang tergambar pada latar cerita dan kejadian dalam novel yaitu zaman pascakemerdekaan Indonesia 1946-1947.

Kesimpulannya, novel *Jalan Tak Ada Ujung* karya Mochtar Lubis berhasil merefleksikan zaman revolusi melalui latar atau *setting* pada tahun 1946-1947. Novel *Jalan Tak Ada Ujung* karya Mochtar Lubis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran apresiasi sastra di sekolah karena novel tersebut juga bisa menjadi dokumen sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti Mochtar Lubis, hanya saja di skripsi ini yang diteliti adalah karya sastra Mochtar Lubis. Perbedaanannya, penelitian penulis meneliti prinsip kewartawanan Mochtar Lubis dalam buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad*.

5. Artikel Sri Mustika dengan judul “Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pemberitaan di Media Massa” dalam Jurnal Komunikasi Islam Vol. 2 No. 2 tahun 2012.³⁸ Artikel ini membahas bagaimana media massa menggunakan kode etik jurnalistik (KEJ) dan nilai-nilai Islam dalam melakukan pemberitaan kasus korupsi. Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa beberapa media keblabasan dan melakukan pengadilan pers (trial by press). Padahal dalam menulis berita, wartawan seharusnya berpegang pada KEJ. Apalagi bagi wartawan muslim, seharusnya juga berpegang pada nilai-nilai Islam dalam melakukan pemberitaan.

Persamaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan etika jurnalistik untuk melihat fenomena pers. Perbedaanannya, penelitian penulis

³⁸ Sri Mustika, “Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Pemberitaan Korupsi di Media Massa”, dalam *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 02, No. 02, Desember, 2012, hlm. 175-185. Diambil dari <http://jki.uinsby.ac.id>

menggunakan etika komunikasi massa Islam menurut Mafri Amir sedangkan artikel ini menggunakan KEJ dan beberapa ayat Alquran dan hadis. Penelitian penulis melihat prinsip kewartawanan Mochtar Lubis dalam buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad* sedangkan artikel ini melihat pemberitaan tentang aktor korupsi di media massa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.³⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan mengidenti-

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 4.

fikasi karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu teks. Analisis isi dilakukan melalui proses identifikasi dan telaah pesan-pesan yang tertuang dalam suatu teks.⁴⁰

Dalam penelitian ini, karakteristik dan prinsip Mochtar Lubis sebagai wartawan yang terdapat dalam buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad* akan dikumpulkan kemudian akan dilihat dari sudut pandang Komunikasi Islam sehingga menghasilkan kesimpulan apa saja prinsip kewartawanan Mochtar Lubis dan bagaimana pandangan Komunikasi Islam terhadap prinsip tersebut.

2. Definisi konseptual

a) Prinsip kewartawanan

Menurut KBBI, prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip juga bisa disamakan artinya dengan dasar.⁴¹ Dalam skripsi ini kewartawanan yang dimaksud adalah kewartawanan Mochtar Lubis dalam mengelola surat kabarnya jadi kewartawanan

⁴⁰ Asep Saeful Muhtadi dan Maman Abd. Djaliel, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), hlm. 112.

⁴¹ <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/> diakses pada 30 Oktober 2016 pukul 14.18 WIB

diartikan kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi kemudian menulis, menyunting, dan menerbitkannya di surat kabar. Prinsip kewartawanan adalah dasar-dasar kebenaran yang harus dipraktekkan dalam proses penerbitan surat kabar. Prinsip kewartawanan Mochtar Lubis berarti dasar-dasar kebenaran yang dianut dan dipraktekkan Mochtar Lubis dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan dan pemilik surat kabar.

b) *Buku Mochtar Lubis Wartawan Jihad*

Buku Mochtar Lubis Wartawan Jihad merupakan bunga rampai, yaitu buku yang ditulis oleh orang banyak yang isinya menceritakan tentang kehidupan Mochtar Lubis sebagai wartawan dan sastrawan. Kumpulan tulisan orang-orang tersebut dikumpulkan oleh panitia penerbitan buku peringatan 70 tahun Mochtar Lubis yaitu Jakob Oetama dari harian *Kompas* sebagai ketua, Sabam Siagian dari *The Jakarta Post* sebagai sekretaris, Dja'far Husin Assegaff dari Lembaga Pers Dr. Soetomo sebagai anggota, dan Atmakusumah sebagai anggota dan penyunting buku.⁴²

⁴² Atmakusumah (ed), *Mochtar Lubis Wartawan Jihad*, (Jakarta: Harian KOMPAS, 1992), hlm. ix-xi.

Buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad* diterbitkan oleh penerbit Harian Kompas pada tahun 1992. Buku yang disunting oleh Atmakusumah ini bertebal 527 halaman. Secara garis besar, buku ini dibagi dalam empat bagian. Bagian pertama bertema Mochtar Lubis dan *Indonesia Raya*. Bagian kedua berisi pikiran dan pendapat tentang Mochtar Lubis dan *Indonesia Raya*. Bagian ketiga berisi pandangan Mochtar Lubis. Bagian keempat berisi buku-buku karya Mochtar Lubis.

c) Komunikasi Islam

Dalam skripsi ini, komunikasi Islam adalah komunikasi yang sesuai dengan prinsip komunikasi dalam Alquran dan Hadis. Makna dari frasa “ditinjau dari perspektif Komunikasi Islam” adalah dilihat dari sudut pandang etika komunikasi Islam, khususnya etika komunikasi massa Islam. Etika komunikasi Islam berarti yang baik atau tidak baik, yang benar atau tidak benar, yang pantas atau tidak pantas, yang berguna atau tidak berguna, dan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam komunikasi menurut pedoman Islam yaitu Alquran dan hadis.

Etika komunikasi Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah versi Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya yang berjudul *Islam Aktual: Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim* yaitu *qawlan sadidan, qawlan baligha, qawlan karima, qawlan ma'rufan, qawlan layyina, qawlan maisura*. Etika komunikasi Islam ini digunakan sebagai alat ukur prinsip kewartawanan Mochtar Lubis dalam buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad*.

3. Sumber dan jenis data

a) Sumber data primer

Sumber data primer atau utama dalam penelitian ini adalah buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad*.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun referensi lain yang berkaitan dengan tema-tema yang dibahas dalam skripsi ini yaitu kewartawanan, komunikasi massa, dan komunikasi Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Penulis membaca buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad* dan karakteristik Mochtar Lubis sebagai wartawan yang tertulis dalam buku tersebut akan didokumentasikan. Nantinya akan terkumpul daftar karakter dan prinsip Mochtar Lubis sebagai wartawan. Daftar karakter tersebut yang akan menjadi unit analisis.

5. Teknik Analisis data

Penulis menggunakan teknik analisis isi yaitu teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu teks. Analisis isi ini dilakukan melalui proses identifikasi dan telaah pesan-pesan yang tertuang dalam suatu teks.⁴³

Tujuan utama analisis isi adalah menjelaskan karakteristik dari pesan-pesan yang termuat dalam teks-teks umum dan bermedia. Krippendorff menjelaskan beberapa kelebihan analisis isi dibandingkan dengan teknik angket dan wawancara, terutama untuk

⁴³ Asep Saeful Muhtadi dan Maman Abd. Djaliel, *Op. Cit.*, *Metode Penelitian Dakwah*, hlm. 112

menjelaskan watak komunikasi serta mengkaji hubungan antar variabel input, komunikasi, dan output.⁴⁴

Pertama, analisis isi merupakan teknik yang tidak *njelimet* sebab hanya mengkaji teks-teks yang telah tersedia, dan bukan untuk mengkaji teks-teks yang sengaja dipesan terlebih dahulu oleh peneliti dari pihak-pihak tertentu.

Kedua, analisis isi menerima bahan-bahan yang tidak terstruktur, yang akan dikategorisasikan langsung oleh peneliti. Sebaliknya, angket dan wawancara yang terstruktur hanya mengungkapkan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan yang cenderung membatasi responden dalam menjawabnya.

Ketiga, angket dan wawancara seringkali memperoleh data dari setting yang jauh dari konteks suatu komunikasi berlangsung, sedangkan analisis isi mengkaji data sesuai dengan apa yang muncul pada suatu konteks.

Keempat, analisis isi dapat mengatasi jumlah data yang sangat besar, khususnya yang menggunakan teknik penyimpanan informasi menggunakan komputer. Gerbner, Gross, Signoroelli, Morgan, dan Jackson Beek (1979) misalnya, menganalisis isi 15.000 karakter dari 1000 jam tayang cerita-cerita fiksi dalam televisi untuk menjelaskan kuatnya pengaruh tayangan televisi pada jam-jam utama terhadap munculnya tindak kekerasan.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 113

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 114

Analisis isi adalah prosedur bertahap dan sistematis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Prosedur tersebut meliputi seleksi teks, penentuan unit-unit data untuk ditandai, pengembangan kategorisasi isi, dan analisis data.⁴⁶

Tahapan analisis isi dalam penelitian ini adalah:⁴⁷

1) Seleksi teks

Pertama-tama analisis isi dilakukan dengan menentukan keseluruhan teks yang akan digeneralisasi, lalu menggunakan beberapa prosedur untuk menyeleksi sampel dari keseluruhan teks tersebut. Peneliti sudah menentukan bahwa teks yang dipilih adalah buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad*.

2) Menentukan unit analisis

Peneliti menentukan unit analisis dengan dengan melakukan pengodean pesan-pesan di dalam teks, yaitu buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad*. Pengodean ini berpedoman kepada pertanyaan penelitian sehingga akan mengarahkan peneliti kepada unit-unit yang cocok untuk diteliti. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana prinsip kewartawanan Mochtar Lubis yang terdapat dalam

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

buku *Mochtar Lubis Wartawan Jihad*. Unit-unit analisisnya adalah isi teks yang menggambarkan prinsip dan karakter Mochtar Lubis sebagai wartawan, pemimpin redaksi, dan pemilik pers.

3) Mengembangkan kategori isi

Setelah unit-unit analisis yang cocok diidentifikasi, peneliti menggunakan prosedur pengukuran nominal untuk mengembangkan kategori-kategori menjadi unit-unit yang dapat diklasifikasikan. Karena penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana kesesuaian prinsip kewartawanan Mochtar Lubis dengan etika komunikasi Islam, maka kategori yang akan digunakan adalah etika komunikasi Islam yaitu *qawlan sadidan*, *qawlan baligha*, *qawlan karima*, *qawlan ma'rufan*, *qawlan layyina*, *qawlan maisura*

Analisis data

Setelah unit dan kategori ditentukan, baru dilakukan analisis data melalui teknik:

- (a) Data-data yang diperoleh dari kategori dianalisis dan distrukturkan dalam kalimat-kalimat yang menggambarkan maksud kategori tersebut

- (b) Membuat kesimpulan dari analisis yang dilakukan untuk memperoleh jawaban dari masalah penelitian.

Tabel 1. Analisis Data Penelitian

No	Unit Analisis	Kategori					
		a	b	c	d	e	f

Keterangan:

- a. *Qawlan sadidan*
- b. *Qawlan baligha*
- c. *Qawlan karima*
- d. *Qawlan ma'rufan*
- e. *Qawlan layyina*
- f. *Qawlan maisura*